

14.

**FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS MUNCULNYA
KORUPSI DI INDONESIA**

**Oleh :
Dr. Zainal Abidin, M.Si**



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN
JUNI, 2009**

**FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS MUNCULNYA
KORUPSI DI INDONESIA**

**Oleh :
Dr. Zainal Abidin, M.Si**



**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN
JUNI, 2009**

TELAH DICATAT/DIDOKUMENTASIKAN PADA
PERPUSTAKAAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kepala Perpustakaan



Dr. Ratna Jatnika, MT
NIP. 19632021988032003

Telah diperiksa oleh :
Guru Besar/Dosen Senior

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kusdiratri Setyono'.

Prof. Dr. Hj. Kusdiratri Setyono

Mengetahui :

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP. 1947111819032001

KETUA BAGIAN PSIKOLOGI KLINIS



Drs. H. Hatta Albanik, M.Psi
NIP. 194705121981031001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP. 1947111819032001

Terdaftar di Perpustakaan
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran



FAKTOR-FATOR PSIKOLOGIS MUNCULNYA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Zainal Abidin¹

Ahmad Gimmy Prathama²

Abstract

Abstract

This study intended to examine more deeply about the civil officer's perception toward corruption, social norm, law enforcement, standards of living, criteria for success in life, and the effect of those variables towards corruption. Samples are civil servants from 4 cities, that is Yogyakarta (164), Palangkaraya (140), Tegal (123), and Kupang (111). Data retrieval is done by Questionnaires and Focus Group Discussions. The quantitative data are statistically processed with descriptive statistical techniques, ANOVA, and Linear Regression with SPSS 16.0 software support, while the qualitative data from FGDs were analyzed with coding qualitative methods. The conclusion drawn from this research are the perception of corruption, law enforcement, and social norms have an impact on the appearance of corruption behavior, but the perception of living standards does not contribute significantly to the emergence of corruption behavior. The recommendation from this study are: first, it is important to socialize the definition whether the certain behaviors are corruption or not with a clear and distinct definition. Second, the law enforcement and control social must be given as the negative reinforcement to extinct corrupt behavior, third, it is important to make a study with social culture as the 'comprehensive factor' for the corruption behavior.

Key terms: corruption, perception of corrupti behavior, social norms, law enforcement, standards of living, criteria for success.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang korupsi, norma sosial, penegakan hukum, standar hidup, kriteria sukses dalam kehidupan dan pengaruhnya terhadap perilaku korupsi. Sampel penelitian diambil berdasarkan ranking indeks korupsi menurut Transparency International Indonesia. Partisipan terdiri dari para PNS sebanyak 164 dari Yogyakarta, 140 dari Palangkaraya, 123 dari Tegal, dan 111 dari Kupang. Pengambilan data dilakukan dengan kuesioner dan diskusi kelompok terfokus (Focus group Discussion/FGD). Teknik statistik ANOVA dan Regresi Linier dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS 16.0, sementara data dari FGD dianalisis dengan metode pengkodean secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi tentang korupsi, penegakan hukum, dan norma sosial memiliki pengaruh pada pemunculan perilaku korupsi, akan tetapi persepsi ttg standar hidup kurang memberikan kontribusi yang signifikan. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk: pertama, perlu mensosialisasikan pengertian korupsi dan tindak korupsi secara lebih tegas dan jelas, kedua, lebih menggalakkan penegakan

hukum dan kontrol sosial dari lingkungan sebagai penguat negative terhadap sanksi korupsi, ketiga, karena korupsi berkaitan dengan persepsi sebagai suatu produk budaya masyarakat, penelitian yang mengikut sertakan aspek budaya sebagai salah satu faktor tampaknya merupakan hal yang perlu diutamakan dalam penelitian tentang korupsi selanjutnya.

Kata Kunci : Persepsi tentang Korupsi, Norma Sosial, Penegakan Hukum, Standar Hidup, dan Kriteria sukses dalam kehidupan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kemakmuran sebuah bangsa. Ia bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan sebagian dari warga negara untuk dapat hidup secara makmur. Oleh sebab itu dapat dipahami jika kita ada pendapat bahwa korupsi pun bertentangan prinsip keadilan, karena dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh seorang koruptor terdapat kerugian yang harus ditanggung oleh sejumlah warga negara.

Di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan pemberantasan korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara yang oleh sejumlah lembaga asing dikelompokkan sebagai negara terkorup. Meski sebetulnya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah membawa sedikit kemajuan di bidang pemberantasan korupsi, tapi berarti bahwa negara kita terlepas dari sebutan negara korup. Data terbaru yang dipublikasikan oleh Transparency International (<http://www.transparency.org/2008>) memperlihatkan bahwa skor *Corruption Perception Index* pemerintah Indonesia mengalami peningkatan, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 Skor CPI Indonesia adalah 2,0, meningkat menjadi 2,4 pada tahun 2006, dan menjadi 2,6 pada tahun 2008. Namun, tidak berarti bahwa peringkat Indonesia lebih baik dari negara-negara lain. Posisi Indonesia masih tetap di peringkat bawah, yakni di urutan 130-an dari 180 negara yang disurvei (<http://www.transparency.org/2008>). Bandingkan misalnya dengan skor CPI negara-negara yang paling bersih dari korupsi, seperti Denmark (9,4), Finlandia (9,4), New Zeland (9,4), Singapore (9,3), dan Swedia (9,3).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga anti-korupsi di Indonesia seperti *Indonesia Corruption Watch* (2005), Komite Pemberantasan

Korupsi (KPK) (2007), dan *Transparency International Indonesia* (TII) (2009) seakan-akan memberi justifikasi pada sejumlah temuan lembaga-lembaga internasional tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut pada dasarnya mencerminkan betapa kronisnya masalah korupsi di tanah air ini. (<http://www.transparency.org/2008>)

Temuan survey terbaru yang dilakukan oleh TII (2008) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 50 kota (pemerintah daerah tingkat II, atau Pemda Tk II) di Indonesia (<http://www.ti.or.id>) menunjukkan bahwa terdapat kota-kota yang tingkat IPK-nya paling tinggi dan paling rendah. Skor IPK tinggi artinya masyarakat (terutama pebisnis) mempersepsi bahwa birokrasi pemerintah daerah setempat relatif bersih, sedangkan skor IPK rendah artinya birokrasi pemerintah daerah setempat relatif korup. Kota-kota "terkorup" antara lain adalah Kupang, Tegal, Manokwari, Kendari, dan Purwokerto ; sedangkan "terbersih" adalah Yogyakarta, Palangkaraya, Banda Aceh, Jambi, dan Mataram.

Penelitian-penelitian yang baru dijelaskan, dan penelitian-penelitian lain yang sejenis, sangat penting sebagai sumber informasi ilmiah untuk mengetahui masalah korupsi di Indonesia. Sayangnya, belum ditemukan penelitian serupa berdasarkan kajian psikologis, khususnya psikososial. Penelitian-penelitian yang tadi disebut lebih berupa kajian ekonomi, hukum, organisasi, dan politik (kebijakan public). Diperlukan kajian dengan perspektif yang berbeda untuk bisa menjelaskan secara komprehensif masalah korupsi di Indonesia. Perspektif dimaksud adalah perspektif psikososial. Korupsi pada dasarnya bukan hanya masalah pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan ekonomi yang bersifat pribadi atau kelompok, kondisi politik yang kondusif untuk disalahgunakan, tapi juga berkaitan dengan masalah persepsi para partisipan yang oleh para pebisnis dan pengamat bisnis dipersepsi sebagai pelaku korupsi. Dengan perkataan lain, perlu kajian mengenai bagaimana para birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS atau *civil servants*) mempersepsi korupsi dan bentuk-bentuk perilaku korupsi.

Penelitian seperti itu penting untuk mengidentifikasi salah satu faktor pendorong munculnya korupsi dan meramalkan perilaku korupsi. Secara psikologis,

persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku (Goldstein, 2000; Baron, Byrne, and Newcomb, 2006), termasuk tingkah laku korupsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada stimulus tertentu dan pemaknaan tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkah laku terkait dengan stimulus tersebut. Misalnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) mempersepsi tingkah laku menerima hadiah dari masyarakat yang sedang mengurus perizinan sebagai tingkah laku yang lazim dan tidak melanggar hukum. Persepsi seperti ini dapat mendorong PNS itu untuk menerima atau bahkan meminta imbalan dari masyarakat yang sedang mengurus perizinan di kantor tempat PNS itu bertugas. Kemungkinannya akan berbeda jika PNS itu mempersepsi bahwa tingkah laku menerima hadiah itu sebagai tindakan menerima suap atau gratifikasi (dua bentuk tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai korupsi), sehingga dia enggan untuk menerima apalagi meminta imbalan dari masyarakat.

Berdasarkan pada asumsi bahwa persepsi mempengaruhi perilaku, maka kami mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana persepsi PNS atau birokrat yang berasal dari 2 kota yang memiliki skor IPK paling tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan paling rendah (Kupang dan Tegal) terhadap sejumlah stimulus yang berkaitan dengan tingkah laku korupsi. Stimulus-stimulus yang dipersepsi tersebut adalah korupsi, penegakan hukum, norma sosial, kriteria sukses, dan standar hidup.

Pertama, persepsi korupsi. Diduga ada kecenderungan pada para birokrat atau PNS untuk mempersepsi (memaknakan) suatu tindakan tertentu sebagai sesuatu yang lazim dan bukan korupsi, meski sebetulnya secara hukum tindakan itu adalah korupsi. Persepsi seperti itu pada akhirnya berpengaruh pada tindakan mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Contoh konkritnya seperti ini: seorang PNS mempersepsi bahwa menerima uang balas jasa dari masyarakat yang sedang mengurus KTP bukanlah merupakan tindakan korupsi, maka mereka akan terus menerima dan bahkan meminta imbalan dari masyarakat yang mengurus KTP.

Kedua, persepsi tentang kesuksesan. Persepsi tentang kesuksesan hidup

berhubungan dengan tingkah laku korupsi. Seperti diungkap oleh Powtaka (dalam Takemi Fujikawa, *An experimental study.....* p.14), *"the intention to bribe positively correlates with an individual's attitude towards the need to succeed"*. Dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini, masyarakat sering menilai bahwa individu-individu sukses adalah individu-individu yang memiliki kekayaan material yang melimpah, di atas rata-rata yang dimiliki anggota masyarakat pada umumnya. Kekayaan dinilai sebagai tolok-ukur atau indikator kesuksesan, terlepas apakah kekayaan itu didapat secara legal (sah) atau tidak legal (melalui korupsi). Penghargaan terhadap anggota masyarakat atau anggota keluarga yang memiliki kekayaan material berlebih jauh lebih positif dibandingkan dengan terhadap anggota-anggota yang tidak memiliki kekayaan (miskin atau sederhana). Persepsi masyarakat seperti ini dapat mendorong anggota masyarakat tertentu (PNS dan pegawai non-sipil) untuk melakukan jalan pintas, termasuk korupsi.

Ketiga, persepsi tentang penegakan hukum. Persepsi tentang penegakan hukum memiliki peran penting dalam memunculkan tingkah laku melanggar hukum (Abidin, 2005), termasuk korupsi. Jika seorang birokrat mempersepsi bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga teman-teman di lingkungan kerjanya yang melakukan korupsi tidak ditindak baik secara hukum maupun administratif (institusional), maka mereka akan terdorong untuk melakukan korupsi.

Keempat, persepsi tentang standar hidup. Faktor ekonomi sering diduga menjadi determinan munculnya perilaku korupsi (Svenson, 2005). Orang melakukan korupsi karena penghasilan yang mereka terima dinilai tidak mencukupi untuk hidup. Namun, secara psikologis, cukup atau tidak cukupnya penghasilan tergantung pada standar hidup yang mereka tetapkan. Standar hidup yang melampaui penghasilan perbulan menyebabkan gaji yang mereka terima dinilai kurang mencukupi. Sebaliknya, standar hidup yang sesuai dengan penghasilan yang mereka terima, menjadikan gaji dinilai cukup memadai.

Kelima, persepsi tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau

konvensi yang diterima oleh anggota masyarakat dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat itu, baik dalam sikap, keyakinan, maupun tingkah laku. Jika seorang PNS menilai bahwa masyarakat cukup toleran terhadap korupsi, maka dia tidak merasa mengalami hambatan dalam melakukan korupsi, sehingga korupsi menjadi suatu kebiasaan.

Meski demikian, dugaan atau asumsi di atas masih memerlukan pembuktian empiris. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pembuktian empiris terhadap dugaan tadi.

Pada dasarnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang akan dicari jawabnya dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah:

1. Bagaimana persepsi PNS tentang korupsi? perilaku-perilaku apa saja yang dapat dikategorikan korupsi dan bukan korupsi?
2. Bagaimana PNS memaknakan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosialnya tentang korupsi? Apakah mereka menilai bahwa masyarakat memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim, karena rekan-rekan PNS lain pun melakukan korupsi?
3. Apa yang menjadi ukuran bagi PNS dalam menentukan kriteria kesuksesan hidup mereka?
4. Bagaimana PNS menilai penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, baik tingkat institusional maupun legal?
5. Standar hidup seperti apa yang dijalani dan diinginkan oleh PNS?
6. Apakah ada perbedaan persepsi/pemaknaan tentang kelima hal tadi diantara PNS dari dua kota yang IPK-nya paling tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan paling rendah (Kupang dan Tegal)?
7. Apakah mereka pernah melakukan suatu tindakan tertentu yang termasuk dalam tindakan korupsi? jika ya, jenis perilaku koruptif seperti apa?
8. Apakah ada pengaruh persepsi PNS tentang korupsi, penegakan hukum, kriteria sukses, norma sosial, dan standar hidup terhadap tingkah laku korupsi? Variabel-variabel persepsi mana saja dari 5 persepsi tersebut (yakni,

persepsi tentang korupsi, persepsi tentang nilai-nilai sosial, persepsi tentang kesuksesan, persepsi tentang penegakan hukum, dan persepsi tentang standar hidup) yang memiliki kontribusi terhadap tingkah laku korupsi? seberapa besar kontribusinya?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (1994), pendekatan kuantitatif merupakan “ *an inquiry into a social or human problem, based on testing a theory composed of variables, measured with numbers, and analyzed with statistical procedures, in order to determine whether the predictive generalization of the theory hold true* (5, 1994). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah “.... *inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting of informants, and conducted in a natural setting* (1-2, 1994)

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa survey. Melalui survey kami dapat membuat deskripsi dan penjelasan statistik mengenai sejumlah variabel yang diduga berkaitan dengan tingkah laku korupsi, diantaranya: persepsi korupsi, persepsi tentang penegakan hukum, persepsi tentang nilai sosial, persepsi tentang kesuksesan, dan persepsi tentang standar hidup. Melalui teknik ini dapat diidentifikasi perbedaan antara 4 kota yang menjadi sampel penelitian (Kupang, Tegal, Yogyakarta, dan Palangkaraya) dalam kaitannya dengan variabel-variabel tadi. Di samping itu, dapat diketahui juga kontribusi atau pengaruh kelima variabel persepsi terhadap variabel tingkah laku korupsi.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menunjang pendekatan kuantitatif. Pengambilan data dalam pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Tujuan interviu dan FGD dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam yang tidak ditemukan dalam pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan di empat Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Kota di

Indonesia, yaitu Kupang, Palangkaraya, Yogyakarta, dan Tegal. Menurut hasil riset Transparency International Indonesia (TII) keempat kota itu terdiri dari 2 kota yang dipersepsi oleh masyarakatnya paling tinggi indeks persepsi korupsinya (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan 2 kota paling rendah indeks persepsi korupsinya (Kupang dan Tegal). Dengan demikian, penentuan sample awal pada dasarnya dilakukan secara purposif (*purposive sampling*).

Jumlah sampel dalam penelitian ini 538 responden, dengan perincian sebagai berikut: Kupang (111 orang), Palangkaraya (140 orang), Yogyakarta (154 orang), dan Tegal (123 orang). Mereka adalah para birokrat (PNS) dari sejumlah dinas yang ada di lingkungan Pemda setempat.

Instrumen kuantitatif yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 6 buah angket, yaitu angket: Persepsi korupsi, Persepsi tentang norma sosial, Persepsi tentang penegakan hukum, Persepsi tentang standar hidup, Persepsi tentang kriteria sukses, dan Tingkah laku korupsi. Sedangkan instrumen untuk pengambilan data kualitatif adalah berupa *interview guide* untuk wawancara dan *FGD guide* untuk *focus group discussion*. *Interviu* dilakukan di setiap kota terhadap sejumlah pejabat pemda setempat, sedangkan *FGD* dilakukan terhadap para staf dari sejumlah dinas Pemda setempat. Di samping itu, untuk *cross check* data dan untuk mendapatkan informasi tambahan, kami pun melakukan wawancara ke sejumlah tokoh masyarakat (*akademisi*) dan penduduk setempat (berkisar antara 2 sampai 4 orang di setiap kota).

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 17 Agustus 2009 sampai 22 Oktober 2009. Lokasi pengambilan data pertama adalah Pemda Kupang (17 – 22 Agustus 2009), Palangkaraya (14 – 18 September 2009), Yogyakarta (11 - 14 Oktober 2009), dan terakhir Tegal (18 – 22 Oktober 2009).

Data kuantitatif dianalisis melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial, menggunakan program SPSS versi 15 dan 17. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 dilakukan dengan cara menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi dari total data masing-masing variabel dan item-itemnya dengan. Untuk menjawab pertanyaan 5 digunakan teknik statistik analisis varians (*general linear*

model). Sedangkan untuk menjawab pertanyaan 8 digunakan teknik analisis statistik *multiple regression*.

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis coding, yaitu mengkategorisasikan sejumlah pernyataan responden hasil FGD ke dalam variabel-variabel penelitian dan membuat tema-tema baru jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam variabel-variabel yang sudah ada tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa fakta berikut ini:

Ada perbedaan menarik dalam hal bagaimana para PNS mempersepsi korupsi di antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhir relatif memiliki persepsi yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang sebetulnya korupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta ada 6 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas 8) dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan korupsi dan kota Palangkaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota Kupang dan Yogyakarta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi.

Ada perbedaan menarik dalam bagaimana para PNS mempersepsi korupsi di antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhir relatif memiliki persepsi yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang sebetulnya korupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta

ada 6 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas 8) dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan korupsi dan kota Palanglaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota Kupang dan Yogyakarta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi.

Hasil analisis mengenai persepsi tentang norma sosial, ditemukan kesamaan umum di antara keempat kota dalam menilai situasi "keluarga senang jika suami atau istri menerima hadiah dari kliennya. Temuan ini sebetulnya menunjukkan justifikasi atas dugaan sejumlah pendapat bahwa masyarakat (termasuk keluarga) kita memberikan pembenaran atas pemberian dan penerimaan hadiah, misalnya dalam bentuk *parcel*. Alasannya adalah, si penerima hadiah memiliki pengaruh yang besar, *powerful* terhadap orang lain (pemberi hadiah). Hal ini menimbulkan rasa bangga pada anggota keluarga penerima hadiah. Di Kota Palangkaraya bahkan, keluarga menganggap wajar jika PNS diberi tiket pesawat oleh anggota masyarakat.

Hasil analisis terhadap persepsi penegakan hukum menunjukkan bahwa keempat kota yang menjadi sampel penelitian ini secara bersama-sama menilai bahwa telah terjadi peegakan hukum di kota mereka. Temuan dari data kuantitatif ini sangat berbeda dari temuan kualitatif yang menunjukkan bahwa hanya PNS di Kota Yogyakarta dan juga Palangkaraya yang menilai secara sangat kuat bahwa hukum dan juga sistem di kantor pemda sudah sangat kuat ditegakkan. Di Yogyakarta misalnya sejumlah PNS mengaku takut melakukan pelanggaran karena hukum telah berjalan dengan sangat ketat. Pengakuan serupa tidak ditemukan dari PNS-PNS di kota-kota lain.

Temuan mengenai persepsi tentang standar hidup menunjukkan bahwa Tegal, Yogyakarta, dan Palangkaraya relatif menerima dengan ikhlas kondisi hidup yang menjadi standar hidup mereka. Perbedaan justru ditemukan di Kupang. Di kota ini para PNS pada umumnya mengaku bahwa standar hidup dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan menjadi PNS itu pun diakui oleh mereka bukan yang mereka harapkan, karena gaji PNS relatif kecil. Perlu diduga bahwa benih-benih korupsi berasal dari ketidak-puasan atas kondisi ekonomi, dari lebarnya jurang antara

standar hidup yang diidamkan dengan capaian untuk meraih standar hidup itu.

Terkait dengan temuan tentang tingkah laku korupsi ditemukan fakta menarik. Pada umumnya PNS di Kupang mengaku tidak pernah melakukan satu pun jenis perilaku korupsi, bahkan dengan kuat mereka menyatakan tidak akan pernah meminta apa pun dari masyarakat yang sedang mengurus urusannya di kantor pemerintah. Demikian juga dengan Yogyakarta, yang mengaku tidak akan pernah menerima amplop. Hanya kota Tegal dan Palangkaraya yang mengaku pernah melakukan korupsi, yakni dalam bentuk meminjam sarana kantor untuk urusan keluarga (Palangkaraya dan Tegal), menerima pemberian dari masyarakat yang mengurus urusan di kantor PNS (Palangkaraya), dan memberi kepada seseorang yang mengurus kenaikan pangkat (Palangkaraya).

Berikut ini adalah gambaran sampel penelitian di empat kota dalam hal bagaimana mereka mempersepsi kriteria sukses mereka.

TABEL 1 Gambaran kriteria kesuksesan di Empat Kota

KRITERIA SUKSES	URUTAN DI KUPANG	URUTAN DI PALANGKARAYA	URUTAN DI YOGYA-KARTA	URUTAN DI TEGAL
Relijiusitas	1	1	1	1
Kejujuran	2	2	2	2
Materi	3	6	7	4
Kesehatan	4	3	3	3
Pendidikan	5	4	5	5
Hubungan keluarga	6	5	4	6
Status sosial	7	7	8	7
Persahabatan	8	8	6	8
Keseimbangan	9	9	9	9
Jadi pimpinan di kantor	10	10	10	10

Dari data di atas tampak bahwa PNS di empat kota memiliki kesamaan dalam

menentukan kriteria pertama dan kedua kesuksesan hidup, yaitu religiusitas dan kejujuran. Kesamaan lainnya adalah dalam menentukan urutan kesembilan dan sepuluh, yaitu keseimbangan hidup dan ambisi menjadi pimpinan di kantor. Ini berarti bahwa baik kota-kota yang oleh TII dikategorikan memiliki indeks persepsi korupsi tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan rendah (Kupang dan Tegal) sama-sama menempatkan religi dan kejujuran sebagai kriteria utama kesuksesan hidup, sedangkan keseimbangan dan motif untuk menjadi pimpinan di tempat kerja sebagai kriteria sukses yang paling terakhir.

Hal yang membedakan di antara kedua kategori kota itu adalah dalam menentukan materi (uang) sebagai kriteria sukses. PNS di kota Kupang menempatkan materi sebagai prioritas ketiga dan PNS Kota Tegal sebagai ketiga, sedangkan PNS Kota Palangkaraya menempatkan di urutan keenam dan PNS Kota Yogyakarta ketujuh. Atas dasar temuan itu patut diduga bahwa orientasi hidup atau kriteria kesuksesan yang mengarah pada materi sedikit atau banyak dapat memunculkan perilaku korupsi.

Data kualitatif (hasil wawancara dan FGD) dari PNS Yogyakarta menunjukkan temuan menarik, yang patut diduga sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan kenapa Yogyakarta memiliki IPK yang paling tinggi. Ada beberapa penyebab yang teridentifikasi. Pertama, ketatnya kontrol organisasional yang berasal dari berjalannya sistem pelayanan satu atap. Di dalam ruangan pelayanan satu atap itu pun terdapat circuit camera television (CCTV), sehingga tertutup peluang beredarnya calo-calo yang mengklaim dapat mempercepat urusan dengan kantor pemerintah dan memperkecil kemungkinan adanya pungutan liar. Kedua, semua pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat tidak dibayarkan kepada petugas di *desk*, tetapi melalui bank yang letaknya ada dalam ruang satu atap. Ketiga, ketatnya kontrol sosial dari masyarakat, khususnya dari kalangan akademis, pers, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kontrol ini dipersepsi bukan secara negatif, melainkan secara positif. Berbeda dari respons para PNS di kota-kota lain, PNS Yogyakarta menyebut komponen-komponen masyarakat tadi sebagai "teman-teman

pers”, “teman-teman LSM”, “teman-teman dari kampus”. Di kota-kota Kupang dan Tegal responsnya agak negatif. Keempat, muncul kata-kata “malu” pada para peserta FGD. Ketika ditanya kenapa tidak ada dorongan melakukan korupsi, salah satu kata yang paling sering diungkap adalah “malu”. Kata ini tidak pernah muncul dari responden kota-kota lain selain Yogyakarta.

Kelima, penegakan hukum. Meski pada umumnya PNS di semua kota mempersepsi bahwa penegakan hukum telah berjalan, tetapi hanya di Yogyakarta wujudnya paling nyata, yaitu mereka takut terhadap hukum. Pernyataan “takut” muncul secara tematik di hampir semua FGD di beberapa dinas Kota Yogyakarta. Kata ini tidak muncul di kota-kota lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sejumlah temuan dalam penelitian ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa PNS di beberapa kota seperti Palangkaraya dan Tegal mempersepsi suatu perilaku sebagai korupsi, jika perilaku itu merugikan keuangan negara dan jika mereka meminta sesuatu barang atau uang dari masyarakat. Namun, jika mereka menerima pemberian uang atau barang dari masyarakat yang sedang mengurus suatu urusan di kantor tempat mereka bekerja (kantor pemerintah), tindakan itu bukan korupsi. Hanya PNS di Kota Yogyakarta yang secara tegas mempersepsi bahwa suatu perilaku adalah korupsi jika mereka menerima apa pun secara tidak legal dan penerimaan itu terkait dengan jabatan mereka.
2. Sebagian besar PNS di empat kota pada umumnya mengakui bahwa keluarga (istri/suami, anak) akan senang jika mereka menerima hadiah dari kliennya. Ini berarti bahwa menerima hadiah mendapatkan pembenaran social dari keluarga.
3. Pada umumnya PNS di empat kota mengakui bahwa penegakan hukum telah berjalan secara tegas. Namun, berbeda dari kota-kota lainnya, di Yogyakarta bukan hanya penegakan hukum formal yang dipersepsi tegas, tetapi juga sistem

institusional. Di kota dengan tingkat IPK tinggi (Yogyakarta), sistem yang berlaku di institusi pemda memiliki dampak “menakutkan” pada PNS. Artinya, penegakan sistem yang tegas dapat menghambat dorongan untuk melakukan korupsi.

4. Meski pada umumnya PNS di empat kota menempatkan relijiusitas dan kejujuran di ranking pertama dan kedua, tetapi ada yang membedakan antara PNS dari Kota Yogyakarta dan Palangkaraya di satu pihak dengan PNS dari Kota Kupang dan Tegal di pihak lain. PNS di Kota Kupang dan Tegal menempatkan materi/uang di ranking ketiga dan keempat, dibandingkan ranking keenam dan ketujuh di Palangkaraya dan Yogyakarta.
5. Persepsi tentang standar hidup. Pada umumnya dua kota yang IPK-nya tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) relatif lebih bersyukur hidup dan mempersepsi bahwa hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebaliknya, kota yang IPK-nya rendah (Kupang) relatif kurang mensukuri kehidupan
6. Sejumlah PNS di kota Palangkaraya dan Tegal, dan beberapa PNS dari Kupang, mengaku pernah menerima pemberian dari anggota masyarakat yang sedang mengurus urusannya di kantor pemerintah. Sebagian dari PNS di Palangkaraya bahkan mengaku pernah memberi uang kepada petugas yang mengurus kenaikan pangkat.
7. Secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai korupsi, penegakan hukum, dan norma social memiliki pengaruh terhadap munculnya korupsi ($p < 0,05$). Namun persepsi mengenai standar hidup dalam arti sejauh mana subjek puas atau tidak pusernya terhadap standar hidupnya sekarang ini dengan penghasilan yang diperoleh, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya perilaku korupsi ($p > 0,05$).

Saran yang dapat kami kemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya sosialisasi mengenai criteria perilaku birokrasi yang termasuk korupsi dan bukan korupsi. Responden pada umumnya mengaku sulit menentukan apakah perilaku tertentu merupakan perilaku korupsi atau bukan. Patokan buat

banyak responden adalah bahwa sejauh tidak ada kerugian Negara, itu bukan korupsi. Maka, menerima hadiah, itu bukan korupsi, bukan gratifikasi. Dapat dipahami jika pungutan liar bagi mereka bukan korupsi

2. Penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan factor penting yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya korupsi. Namun, penegakan hukum bukan hanya pada level legal formal, tetapi juga institusional, antara lain penegakan disiplin.
3. Perlu digalakkan kontrol sosial dari pihak keluarga, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat umum, dan media massa. Masyarakat yang permisif terhadap korupsi sama dengan mendorong orang untuk melakukan korupsi.
4. Perlu kesedian Pemda untuk dikontrol oleh masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga kontrol sosial seperti media massa, LSM, kampus jangan ditempatkan sebagai lawan pemerintah kota (Pemda), melainkan mitra yang dapat bersinergi membangun kota mereka.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya antara lain:

1. Sesuai dengan kondisi penelitian yang baru mencakup 4 lokasi kota sebagai sampel penelitian, untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dan kaya dapat dipertimbangkan untuk menggunakan lokasi-lokasi (kota-kota) lain yang dapat merepresentasikan hasil persepsi tentang korupsi dari sudut pandang psikososial di Indonesia secara lebih lengkap dan utuh. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penambahan lokasi lain sehingga sampel yang digunakan akan lebih representatif.
2. Penelitian yang mencakup aspek psikososial selain persepsi, seperti sikap, kemampuan mengendalikan diri dalam menentukan perilaku dan intensi untuk menampilkan perilaku serta latar belakangnya juga perlu dipertimbangkan sebagai penelitian lanjutan guna mendapatkan pemahaman tentang aspek perilaku korupsi dan kontribusinya dalam suatu model yang lebih menyeluruh.
3. Pertimbangan akan adanya unsur dan nilai budaya dalam memandang suatu perilaku, termasuk di dalamnya perilaku korupsi dapat dikembangkan dalam

penelitian yang lebih spesifik mengkaji peran budaya dan norma sosial dalam memunculkan perilaku korupsi. Penentuan apakah perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku korupsi atau bukan misalnya, perlu mempertimbangkan nilai budaya yang ternyata cukup kuat dalam mendasari suatu keyakinan tertentu yang terkait dengan gratifikasi dan ungkapan terima kasih yang dipandang 'biasa' dalam suatu hubungan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badin, Z. Psikologi Korupsi di Indonesia. Kompas, 15 Juli 2008
- Badin, Z. "Pesan Moral kasus Urip-Artalyta", dalam Jangan Bunuh KPK. 2009. Jakarta: Gramedia.
- Badin, Z. Koruptor Berseragam? Gatra, 4 September 2008
- Branson, R.A.; Branscombe, N.R.; Byrne, D.. 2008. Social psychology. (twelfth edition). Boston: Pearson
- Bartol & Bartol, 2008. Criminal behavior. A psychosocial approach. Pearson International Edition
- Blackburn, Ronald. 2001, The Psychology of criminal conduct. Theory, research, and process. New York: John Wiley & Sons, Ltd
- Colombatto, Enrico. 2003. Why is Corruption Tolerated? The Review of Austrian Economics, 16:4, 363-379. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
- Dyke, L.S & Murphy, Steven A. 2006. "How we define success: A qualitative study of what matters most to women and men". Sex roles (2006). 55: 357-71. DOI 10. 1007/s11199-006-9091-2
- Godwin, G.M. 2001. Criminal psychology and forensic technology. A collaborative approach to effective profiling. London: CRC Press
- Goldstein, E. Bruce, 2002. Sensation and perception. Pacific Grove: Wordsworth
- Gopinath, C. 2008. "Recognizing and justifying private corruption". Journal of Business Ethics (2008) 82; 747-754. DOI 10.1007/s10551-007-9589-8
- Gorta, A.. 1998. Minimising corruption: Applying lessons from the crime prevention literature. In Crime, law & Social change, 30, 67-68.
- ICW. 2000. Hasil survey korupsi di pelayanan publik. Laporan Penelitian Tim Peneliti Departemen Riset dan kajian Strategis ICW
- Kemitraan bagi pembaharuan pemerintahan di Indonnesia. 2002. Survey mengenai korupsi di Indonnesia. Laporan Penelitian, Februari 2002
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- KPK. 2006. Kondisi dan strategi. Annual report 2006
- KPK. Integritas Sektor Public. 2007. Survey Report
- Lancaster,, T.D & MONTINOLA, Gabriella. 1997. Toward a methodology for the comparative study of political corruption. *Crime, Law & Social Change* 27: 185–206, 1997. 185 c. 1997 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Li S.; Triandis, H.C.; Yu, You. 2006. Cultural orientation and corruption. In *Ethics & behavior*, 16(3), pp.199-215
- Li Shu; Triandis, H.C., & Yu, You. 2006. Cultural orientation and corruption. *ETHICS & BEHAVIOR*, 16(3), 199–215. Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Liu, Zuhua. 2007. Understanding corruption through a cross-national comparison. A dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the State of University of New York at Buffalo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Political Science
- Pellegrini, L. & Gerlagh, Reyer. 2007. Causes of corruption: a survey of cross-country analyses and extended results. *Econ Gov* (2008) 9:245–263. DOI 10.1007/s10101-007-0033-4. © Springer-Verlag 2007
- Quah, John. S.T.. 1999. Corruption in Asian Countries: Can it be minimized? *Public administrative review*, vol.59, No.6 (Nov – Dec), pp.483-494. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3110297>. accessed: 18/07/2008
- Rinaldi, T., Purnomo, M., Damayanti, D. 2007. Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi. Bank Dunia: justice for the poor project
- Robertson-Snape, F. 1999. Corruoption, Collision, and nepotism in Indonesia. *Third world quarterly*, vol.20, No 3, The New politics of corruption (Jun.) pp.589-602. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3993323>. Accessed: 18/07/2008
- Schaefer, R.T. 2006. *Sociology. A brief introduction*. Sixth edition. McGrawHill
- Svensson, Jacob. 2005. Eight questions about corruption. *Journal of economic perspectives*. Volume 19, Number 3, Summer, p.19-42
- Undang-undang (UU) No 31 tahun 1991 jo UU No 20 Tahun 2001

Wilhelm, Paul G. 2002. International validation of the corruption perceptions index: Implications for business ethics and entrepreneurship education. In *Journal of Business Ethics*, 35, 177-189

Zyglidopoulos, S; Fleming, P.; Rothenberg, S.. 2008. Rationalization, overcompensation and the escalation of corruption in organizations. *Journal of business ethics*. DOI 10.1007/s10551-008-9685-4. © Springer-Verlag 2008

Wu, Xun. 2008. Determinants of Bribery in Asian Firms: Evidence from the World Business Environment Survey. *Journal of Business Ethics* _ Springer 2008. DOI 10.1007/s10551-008-9871-4.

Wilhelm, Paul. 2002. International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications for Business Ethics and Entrepreneurship Education. *Journal of Business Ethics* 35: 177–189, 2002. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands